

**Inovasi Pengembangan Ilmu Politik di Indonesia: Pengalaman  
Universitas Indonesia**

**Asep Abdul Sahid**

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN  
Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: asepsahidgatara@uinsgd.ac.id

**Fisher Zulkarnain**

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN  
Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: fisherzulkarnain@uinsgd.ac.id

**Rudi Nasrudin**

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN  
Sunan Gunung Djati Bandung  
Email: nasrudin721@gmail.com

Received: June 9, 2025, Revised: July 15, 2025, Approved: August 3, 2025

**ABSTRACT**

Efforts to develop political science in Indonesia through innovations constantly face external conditions that can become threats on the one hand, and challenges on the other. However, innovations in political science development at the University of Indonesia (UI) tend to demonstrate excellence in overcoming these threats and challenges. This study aims to identify and describe the resources and innovation strategies utilized by UI in developing innovative and superior political science. Using a qualitative approach and descriptive research, this study shows that innovations in political science development at UI have the following characteristics: first, the type of resource support in the form of talent centers, human resource development, and strengthening facilities and infrastructure; second, strengthening governance based on Good University Governance (GUG); third, collaboration with the N-Helix approach, one of which is joint research and joint publications; and fourth, the creation and application of values, known as the 9 UI cultural values, through a transformation strategy. This article can contribute to the debate on patterns of political science development in Indonesia through the innovation strategies used by the political science study program management unit at universities.

Keywords: Innovation, Policy, University of Indonesia, Political Science Development, Program of Study

**ABSTRAK**

Usaha pengembangan ilmu politik di Indonesia melalui inovasi-inovasi senantiasa menghadapi kondisi eksternal yang berubah menjadi ancaman di satu sisi, dan menjadi tantangan di sisi lain. Namun demikian, inovasi pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia (UI) cenderung menunjukkan keunggulan dalam mengatasi ancaman maupun tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan sumber-sumber daya dan strategi inovasi yang didayagunakan UI dalam pengembangan ilmu politik yang inovatif dan unggul. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian

deskriptif studi ini menunjukkan bahwa inovasi pengembangan ilmu politik UI memiliki karakteristik sebagai berikut, pertama, jenis dukungan sumber-sumber daya berbentuk pusat talenta, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan penguatan sarana dan prasarana; Kedua, penguatan tata kelola berbasis Good University Governance (GUG); Ketiga, kolaborasi dengan pendekatan N-Helix dengan salah satu wujud seperti joint research dan publikasi bersama; dan keempat, penciptaan dan penerapan nilai, yang dikenal dengan 9 budaya nilai UI, melalui strategi transformasi. Artikel ini dapat berkontribusi terhadap perdebatan pola-pola pengembangan ilmu politik di Indonesia melalui strategi inovasi yang digunakan unit pengelola program studi ilmu politik pada perguruan tinggi.

Kata Kunci: Inovasi, Kebijakan, Universitas Indonesia, Pengembangan Ilmu Politik, Program Studi

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan ilmu politik merupakan upaya menumbuhkan dan memajukan ilmu politik sebagai suatu disiplin ilmu, baik dalam bahan dan bidang kajian, konsep, teori, metodologi, maupun pemahaman terhadap fenomena politik (Djuyandi, 2023). Sebagai upaya, pengembangan ilmu politik berdimensi proses yang melibatkan banyak aspek, baik aspek sektor maupun aspek aktor. Aspek sektor meliputi sektor konsep, teori, pendekatan, dan paradigma dalam upaya memahami dan menjelaskan semua gejala politik, termasuk sistem politik dan perilaku politik. Sementara, aspek aktor melibatkan sejumlah pihak yang peduli terhadap perkembangan ilmu politik, baik individu-individu maupun institusi-institusi.

Salah satu institusi yang mengembangkan ilmu politik tersebut adalah perguruan tinggi. Suatu lembaga pendidikan yang menjalankan kewajiban tri dharma perguruan tinggi, yaitu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ilmu politik yang dikembangkan di perguruan tinggi tentu tidak akan terlepas dari kewajiban tri dharmanya tersebut.

Di antara perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu politik di Indonesia adalah Universitas Indonesia. Meskipun bukan kelompok pertama atau kelompok perintis perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu politik, namun UI melalui Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menunjukkan keberhasilannya mewarnai, bahkan

dalam kadar tertentu mewarnai secara sangat dominan, perkembangan ilmu politik di Indonesia.

Sebagaimana yang dialami oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi lainnya, termasuk perguruan tinggi yang dikelompokkan sebagai perintis, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Nasional, dan Universitas 17 Agustus (Alfian, 1986), pengembangan ilmu politik lingkungan UI kerap menghadapi sejumlah tantangan bahkan ancaman. Sehingga dalam perjalanannya pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia mengalami dinamika. Seperti tantangan yang tumbuh pada era industri 4.0. Di antaranya adalah kesenjangan digital, data dan privasi, disinformasi dan propaganda, pergeseran perilaku dan partisipasi politik, dan perubahan lanskap politik.

Sejauh ini perhatian dan studi para sarjana tentang pengembangan ilmu politik di Indonesia, sebagaimana permasalahan yang dideskripsikan di atas, lebih banyak menyoroti aspek-aspek yang lebih umum, seperti aspek sejarah perkembangan, termasuk pasang-surut perkembangannya (Budiardjo & Rauf, 1983), aspek sumber-sumber daya manusia, keilmuan, dan kelembagaan (Alfian, 1986; Gatara, 2009), aspek pijakan dan paradigma pengembangan ilmu politik (Gatara et al., 2018). Sementara studi pengembangan ilmu politik yang spesifik pada tema dan fokus terkait inovasi kebijakan dapat dikatakan masih jarang.

Artikel ini berusaha untuk mengisi kesenjangan di atas dengan membahas pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: Jenis dukungan apa saja dalam pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia?; Bagaimana manajemen dalam pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia?; Bagaimana karakteristik hubungan dalam pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia?; dan bagaimana proses penciptaan dan penerapan nilai baru dalam pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia?

Penulis berargumen bahwa inovasi kebijakan mempunyai posisi penting dalam pengembangan ilmu politik di era kekinian. Era yang sarat

dengan tantangan bahkan ancaman terhadap laju perkembangan ilmu politik di Indonesia. Selain itu, inovasi kebijakan dapat menggerakkan berbagai dukungan, menemukan tata kelola baru, merumuskan karakteristik baru, dan menerapkan nilai-nilai baru dalam pengembangan ilmu politik.

Artikel ini akan dilanjutkan sebagai berikut: Bagian kedua akan menyajikan data dan metode penelitian secara singkat; Bagian ketiga menyajikan hasil dan pembahasan; Dan bagian keempat menyajikan kesimpulan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kritis (Creswell, 1994). Studi kasus dijadikan sebagai strategi penelitian ini. Dengan strategi tersebut, penelitian ini tidak hanya untuk mengkaji perkembangan ilmu politik di Indonesia, namun juga berupaya untuk mengidentifikasi penerapan inovasi kebijakan menjadi strategi survival dalam menghadapi kondisi eksternal, baik sebagai tantangan atau ancaman, maupun sebagai peluang. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan di salah satu perguruan umum negeri yang terkemuka yang mengembangkan ilmu politik. Pemilihan dan penetapan Universitas Indonesia sebagai lokus penelitian juga berdasarkan pada model pengembangan ilmu politik, khususnya dilihat dari kelembagaan dan sekaligus keilmuan. Di samping itu, pilihan lokus penelitian itu juga dikaitkan dengan keberagaman konteks kondisi eksternal.

Data dalam penelitian ini mendayagunakan sumber-sumber informasi yang ada pada lokus penelitian. Hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi merupakan sumber data yang menjadi prioritas. Ada dua kategori data yang diperhatikan dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari wawancara dengan para informan kunci, yaitu para pemangku kepentingan pengembangan ilmu politik UI. Selain itu, data primer juga

dihasilkan dari hasil studi observasi ke unit-unit pengelolaan ilmu politik UI. Adapun data sekunder dihasilkan dari hasil studi dokumentasi dengan sumber data website-website yang terkait dengan pengembangan ilmu politik.

Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan merujuk pada model analisis M.B. Miles, Huberman, M. & Saldana (2014), yang mencakup tiga tahap utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi dari wawancara dan observasi untuk berfokus pada isu utama: inovasi pengembangan ilmu politik. Data terpilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik. Terakhir, verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Informan**

Pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah pimpinan universitas, yaitu Rektor yang diwakili oleh Direktur Direktorat Riset dan Pengembangan Universitas, dan pimpinan fakultas, yaitu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang diwakili oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Ilmu Politik (Departemen) dan Ketua Program S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.

Direktorat Riset dan Pengembangan (Risbang) sebagaimana disampaikan oleh direktornya dan dikutip dari <https://research.ui.ac.id/research/profil/> (20/11/2021) merupakan direktorat dalam lingkungan Pusat Administrasi Universitas Indonesia memiliki tugas pokok mengelola kegiatan riset dan pengembangan yang bersifat multidisiplin, intradisiplin, dan transdisiplin di lingkungan Universitas Indonesia. Direktorat Risbang merupakan direktorat dibawah Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi berdasarkan Keputusan Rektor

Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia dan ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Desember 2019 oleh Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M. A., Ph.D.

Direktorat Risbang sebelumnya adalah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) yang telah berjalan sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 04/SK/R/UI/2003 tentang Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia dan Nomor: 262/SK/R/UI/2003 tentang Penghentian Aktivitas Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Masyarakat menjadi Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Selanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi direktorat sendiri yaitu Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dalam menjalankan tugas pokoknya Direktorat Risbang didukung oleh dua Subdirektorat yaitu Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Riset (PPR) dan Pengembangan Kolaborasi Riset (PKR).

### **Karakteristik Inovasi Kebijakan**

Inovasi kebijakan merupakan bagian dari kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya baik internal maupun eksternal dengan didukung kreatifitas birokrasi dan seluruh civitas. Bahwa inovasi harus memiliki impact factor (Faktor dampak) (Salsabila et al., 2024). Dalam konteks itu, inovasi kebijakan bertujuan meningkatkan daya saing, dampak, dan manfaat bagi kepentingan publik. Inovasi kebijakan menjadi tidak inovatif jika kebijakan itu tidak memberikan dampak daya saing dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik (Sururi, 2017).

Navvaro F Marinez (2016), mendefinisikan 3 pendekatan kunci prinsip inovasi kebijakan, yaitu: 1) creation of interactive value (social and public); 2) distributed co-creation; an 3) mass collaboration to inspire the public sphere. Selanjutnya digambarkan inovasi kebijakan dalam 4 karakteristik, yaitu, jenis dukungan, manajemen, jenis hubungan, dan jenis

penciptaan nilai.

Inovasi pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia dapat dipahami dengan karakteristik inovasi kebijakan di atas. Di mana inovasi kebijakan pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia menggambarkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal. Selain itu, ia berdampak meningkatnya daya saing dalam pemenuhan kepentingan-kepentingan publik. Juga, menggambarkan adanya berbagai jenis dukungan, manajemen, hubungan-hubungan, dan penciptaan nilai baru.

### **Pengembangan Ilmu Politik Secara Kelembagaan**

Universitas Indonesia bukan merupakan perguruan tinggi yang pertama melakukan pengembangan ilmu politik di Indonesia. Ilmu politik jauh sebelumnya telah dikembangkan di universitas negeri melalui pendirian Fakultas sosial dan Politik dan pembukaan Program Studi Ilmu Politik. Mereka adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, sebagaimana disampaikan sebelumnya, untuk perguruan tinggi swasta yang pertama mengembangkan ilmu politik melalui program studi ilmu politik adalah Universitas Nasional atau Unnas dan Universitas 17 Agustus. Kedua perguruan tinggi swasta ini, bersama UGM, dalam pengamatan Alfian (1986), merupakan lembaga pendidikan pertama yang memperkenalkan studi ilmu politik di Indonesia.

Untuk konteks di Jakarta, perkembangan pengajaran Ilmu Politik dimulai sejak sekelompok kecil tokoh nasional berhasil mendirikan perguruan tinggi swasta pada tahun 1949 yang diberi nama Akademi, yang kemudian bertransformasi menjadi Universitas Nasional atau belakangan lebih dikenal UNAS (1953). Universitas ini terdiri atas 5 fakultas, yang salah satunya adalah Fakultas Sosial, Ekonomi dan Politik (SEP). Fakultas ini sejak mulanya menitik-beratkan pada kajian ilmu politik, hanya beberapa

mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi dan sosiologi. Pada akhir tahun lima puluhan fakultas ini sudah berhasil menghasilkan beberapa sarjana muda (BA), dan pada tahun 1960 untuk pertama kalinya berhasil meluluskan 2 sarjana dengan gelar Drs (Alfian, 1986).

Masih di Jakarta, namun pada tahun yang sedikit berbeda, yakni tahun 1952, sekelompok nasionalis terkemuka lainnya berhasil mendirikan sebuah perguruan tinggi swasta dengan nama Universitas 17 Agustus. Universitas ini terdiri atas Fakultas Ilmu Politik dan Kemasyarakatan, yang juga dikenal dengan singkatannya IPK, dan Akademi Public Administration. Salah satu jurusan yang pokok adalah ilmu politik, sedang dua lainnya adalah sosiologi dan sosio-ekonomi. Jumlah mahasiswa yang terdaftar pada fakultas ini sejak didirikan sampai tahun 1957 adalah 171 orang. Menjelang tahun itu hanya 15 mahasiswa yang lulus tahun pertama dan 6 mahasiswa lulus pada tahun kedua (Alfian, 1986).

Di Universitas Indonesia (UI) sendiri, pendirian Fakultas soshopol berlangsung belakangan. Hal itu pun dimulai dengan pendirian fakultas yang serupa, yaitu Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, atau dikenal FIS. Meskipun fakultas Ilmu-ilmu Sosial itu baru dibentuk secara resmi pada tahun 1968, namun sudah dimulai sejak tahun 1962. Pada tahun itu di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dibentuk jurusan baru, yaitu publisistik, yang kemudian diikuti oleh pendirian jurusan baru lain seperti Ilmu Politik dan Administrasi Negara. Pada tahun 1968 semuanya dipisahkan dari fakultas tersebut dan dilebur menjadi fakultas baru yang dinamakan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, yang tidak lama kemudian diganti namanya menjadi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial atau FIS. Fakultas baru ini terdiri atas 6 jurusan, yaitu: publisistik, ilmu politik, administrasi negara (termasuk administrasi niaga), sosiologi, kriminologi, dan pekerjaan sosial (<https://fisip.ui.ac.id/sejarah>).

Adapun Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pertama kali didirikan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 42, tanggal 1



Februari 1968. Kemudian, pada tanggal 11 Februari 1996 Diren Dikti mengeluarkan SK Nomor 215/DIKTI/Kep/96 tentang Program Studi Ilmu Politik (<https://ilmu-politik.fisip.ui.ac.id>, diakses 20/10/2021).

### **Paradigma Dan Inovasi Kebijakan**

Paradigma pengembangan Ilmu Politik di Universitas Indonesia senantiasa merujuk pada apa yang disebut sebagai nilai-nilai utama universitas. Sebagaimana disebutkan pada Rencana Strategis UI tahun 2020-2024 bahwa sesuai dengan fungsi universalnya sebagai rumah dan lumbung pengetahuan, teladan, dan kekuatan moral bagi masyarakat, UI menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan perilaku. Nilai-nilai utama yang menjadi pedoman dan membentuk karakter seluruh Warga UI dalam mewujudkan visi dan misinya adalah kejujuran, keadilan, kepercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, kepatuhan pada aturan (Renstra UI 2020-2024).

Adapun kebijakannya dalam pengembangan ilmu politik menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan umum dan arah pengembangan Universitas Indonesia. Pengembangan yang senantiasa memperhatikan jati diri UI, tantangan nasional yang menjadi tanggung jawabnya, dan tantangan global yang dihadapi, perubahan sisi penawaran dan permintaan dalam dunia pendidikan, serta pencapaian UI di periode sebelumnya. Secara spesifik arah pengembangan UI 2019-2024 memperhatikan bahwa:

Pertama, UI adalah universitas yang membawa nama bangsa dan negara yang telah berkomitmen untuk menjadi Guru Bangsa, menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengangkat martabat dan kekayaan budaya bangsa, serta menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun Internasional.

Kedua, jati diri sebagai institusi pendidikan tinggi mengamankan UI untuk melihat tiga dharma yang ada sebagai satu kesatuan, atau three-

in-one. Artinya, fokus kegiatan UI, dan pengembangan, pengukuran kinerja dan beban kerja dosen juga perlu mencakup ketiga dharma ini. Hanya dengan memberikan perhatian yang proporsional kepada tiga dharma ini, UI dapat relevan bagi bangsa Indonesia, diakui reputasinya dan dapat memastikan kebermaknaannya di masa depan.

Ketiga, dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, persaingan pendidikan tinggi di Indonesia dan di dunia menjadi semakin ketat dan transparan. Persaingan yang tidak dapat dihindari ini ditunjukkan antara lain dengan sistem pemeringkatan Kemenristekdikti dan sistem pemeringkatan global ternama, seperti QS dan THE, yang membandingkan secara menyeluruh dan sederhana {mudah dimengerti} berbagai universitas. Karenanya, pemeringkatan ini seringkali menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam menilai kualitas dan reputasi suatu universitas. UI perlu memperhatikan posisinya di pemeringkatan nasional maupun internasional.

Keempat, RPJP UI 2015 - 2035 telah menargetkan bahwa di tahun 2025 UI menjadi universitas yang mandiri, unggul dan otonom. Secara khusus, telah ditetapkan bahwa di tahun 2025 UI mencapai 5 besar Asia Tenggara, sementara peringkat UI stagnan di 5 tahun terakhir (2016-2020) yaitu di tingkat 9 Asia Tenggara menurut QS dunia atau peringkat 10 Asia Tenggara menurut QS Asia. Target yang lebih tinggi lagi bagi UI tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia 2020-2024, yang menyebutkan bahwa di tahun 2024 UI perlu mencapai 100 universitas ternama di dunia berdasarkan pemeringkatan THE, padahal peringkat UI pada tahun 2019 masih berada pada tingkat 601-800 dunia. Dengan adanya target yang sedemikian tinggi, maka diperlukan perubahan yang besar (major changes) di berbagai bidang yang berperan pada reputasi universitas.

Kelima, adanya perubahan kondisi global yang menyebabkan perubahan sisi penawaran dan permintaan atas jasa Pendidikan (Handayani, 2015). Dari sisi penawaran atau penyedia Jasa pendidikan,

terjadi pergeseran pola layanan karena adanya disruptsi teknologi, yaitu pola pelayanan yang awalnya bersifat tatap muka (konvensional) menjadi sistem daring (online). Dari sisi permintaan akan tenaga kerja, ekspektasi dari masyarakat dan industri sekarang lebih berfokus kepada kompetensi dibandingkan ijazah. Dengan demikian, UI perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk lebih memberikan tempat bagi metode belajar-mengajar yang digital serta meningkatkan kompetensi dari lulusannya agar sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini.

Keenam, sebagai universitas yang membawa nama bangsa dan mempunyai jejaring bermakna di pemerintahan. UI perlu mendayagunakan nama besar dan jejaring yang bermakna tersebut untuk membangun kolaborasi nasional dan Internasional, demi lompatan kemajuan UI. Hal ini terutama penting mengingat pentingnya kolaborasi dan networking di persaingan dunia saat ini.

Ketujuh selama lima tahun terakhir (2014-2019), UI telah memulai langkah transformasi terkait tata kelolanya, antara lain dengan dipakainya sistem strategic planning berdasarkan Balanced Scorecards sebagai sistem manajemen organisasi dengan target yang komprehensif dan terukur di berbagai bidang (Handayani, 2015; Zahra & Wahyu, 2025). Dua tahun terakhir Ini (2017-2019), UI juga telah mulai merancang Sistem Keuangan yang lebih sesuai untuk pengelolaan keuangan universitas. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang terintegrasi (Integrated Human Resource System), sistem yang merumuskan beban kerja dosen (FTE Equivalence), Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan whistle-blowing system atau Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (SIPDUGA). Langkah transformasi tata kelola ini perlu diimplementasikan secara menyeluruh, diperkuat, dan dijadikan dasar bagi pengembangan UI selanjutnya (Renstra UI tahun 2020-2024).

### **Konsep Inovasi Pengembangan Ilmu Politik**

Inovasi, sebagaimana telah digambarkan pada hasil temuan di atas,

menjadi salah satu paradigma penting dalam pengembangan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Hal itu seiring dengan moto UI tentang inovasi bagi perkembangan pengetahuan di Indonesia (<https://www.ui.ac.id/inovasi/>, diakses 20 Oktober 2021). Di samping itu sejalan juga dengan Visi Rektor UI tahun 2020-2024, yaitu menjadi UI yang inovatif, mandiri, inklusif, bermartabat, serta unggul di Asia Tenggara dan dunia (Renstra UI 2020-2024, 37). Secara kelembagaan, paradigma, moto, dan visi itu diwujudkan melalui dibentuknya Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi.

Paradigma, moto, dan Visi Rektor tersebut merupakan penjabaran dari Visi UI itu sendiri, yaitu: Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.

Telah banyak inovasi yang didukung UI secara kelembagaan. Saat penelitian ini dilakukan, setidaknya tercatat ada 2.996 inovasi yang didukung UI; 788 Inovasi yang terdaftar Hak Atas Kekayaan Intelektual; 585 inovasi yang dipatenkan; dan 902 inovasi startup yang dibina UI dan mendapat hibah internal atau eksternal (<https://www.ui.ac.id/inovasi/>).

Sebagaimana disebutkan pada bagian temuan, inovasi pengembangan ilmu politik disampaikan secara tersirat dalam arah kebijakan pengembangan UI. Dengan memadukan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat sebagai sebuah pendekatan yang tunggal, utuh dan menyentuh langsung ke akar permasalahan, maka UI dapat berkontribusi langsung sesuai kebutuhan masyarakat dan industri, sekaligus juga menumbuhkan riset-riset berkualitas yang relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Untuk itu diperlukan strategi-strategi yang mengedepankan riset dan inovasi yang unggul, inovatif, dan bereputasi internasional. Riset yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan sebagai produk dan jasa layanan, inovasi-inovasi yang dihasilkan dari riset ini yang

pada akhirnya meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Di samping itu, tersirat juga dalam pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Politik. Pengembangan kurikulum program studi itu sendiri menjadi bagian dari program kerja universitas dan fakultas, sebagaimana tertera dalam Sasaran Strategis Renstra UI 2020-2024 dan disampaikan langsung saat wawancara dengan nara sumber pimpinan FISIP UI (lihat lampiran). Terutama program memperkuat elemen soft-skills dalam proses pembelajaran, membekali mahasiswa dengan interpersonal skill, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkoordinasi, empati, dan kepemimpinan. Program mendorong dosen mengajar dengan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan TI. Dan, program membangun aliansi dengan universitas di luar dan dalam negeri dalam pelaksanaan joint programs.

Saat penelitian ini dilaksanakan, kurikulum pengembangan Ilmu Politik adalah kurikulum 2020 dengan berdasarkan SK Rektor UI Nomor 2352/SK/R/UI/2020 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2020 Program Studi Ilmu Politik Program Pendidikan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Revisi kurikulum Program Studi Ilmu Politik disesuaikan dengan era Revolusi Industri 4.0 (Renstra UI 2020-2024). Adapun penyusunan dan pengimplementasian kurikulum diarahkan untuk lebih fleksibel, sesuai kebutuhan pengguna lulusan, dan lifelong learning. Dikuatkan juga dengan dimasukkannya nilai-nilai enterpeuneurship (hasil wawancara).

Inovasi pengembangan Ilmu Politik di Universitas Indonesia dapat dilihat pada aspek inovasi kebijakan yang berlandaskan pada landasan pemikiran Navarro, sebagaimana disebutkan sebelumnya, karakteristik inovasi kebijakan. Bahwa inovasi harus memiliki impact factor (Faktor dampak). Dalam konteks itu, inovasi kebijakan bertujuan meningkatkan daya saing, dampak, dan manfaat bagi kepentingan publik. Adapun inovasi kebijakan dalam 4 karakteristik, yaitu, jenis dukungan, manajemen, jenis hubungan, dan jenis penciptaan nilai.

### **Strategi Riset dan Inovasi Pengembangan Ilmu Politik**

Menyusun prioritas kegiatan riset yang berdampak penyelesaian masalah bangsa menjadi salah satu strategi yang dipilih UI, termasuk di dalamnya Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimilikinya.

Berdasarkan data yang tersaji, tampak bahwa produktivitas riset dan inovasi terus meningkat melalui program-program di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) dan Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis (DIIB). Kantor Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi (KPPRI) dan Kantor Administrasi Riset dan Inovasi (KARI) merupakan dua unit kerja yang turut mendampingi proses publikasi produk riset dan inovasi serta administrasi terkait.

Bidang riset dan inovasi mendampingi fakultas menyiapkan dan menyelenggarakan berbagai pertemuan ilmiah tingkat internasional yang diarahkan agar dapat menampung berbagai naskah ilmiah hasil riset, kemudian dapat dipublikasikan dan terindeks di database bereputasi seperti Scopus. Kebijakan lain adalah penyediaan dana riset bagi Warga UI. Penyediaan dana oleh UI sendiri dan dari luar. Dalam tahun 2018, UI mendapatkan pendanaan eksternal sebesar Rp 74 miliar.

### **Karakteristik Inovasi Pengembangan Ilmu Politik**

Bertolak dari pemaparan sebelumnya dapat digambarkan bahwa inovasi pengembangan Ilmu Politik di UI memiliki karakteristik sebagai berikut.

#### ***Jenis Dukungan***

Jenis dukungan terhadap inovasi pengembangan ilmu politik di UI antara lain dukungan pusat talenta (strategic competencies), dukungan sumber daya manusia, dan dukungan sarana-prasarana. Dukungan talenta

dikonstruksi dalam dan melalui program kerja, seperti melakukan pelatihan berkala untuk membangun kapasitas dan komitmen dosen dan tendik. Selain itu, mengundang profesional dengan talenta terbaik untuk bergabung di UI.

Sementara dukungan Sumber Daya Manusia, berdasarkan Statuta UI, menyebutkan bahwa sumber daya manusia (SDM) UI terdiri dari tenaga pendidik (dosen) dan staf atau tenaga kependidikan (tendik), yang mencakup status pegawai PNS dan Pegawai UI (PUI). Total dosen tetap UI berdasarkan status pegawai (CPNS, CPUI, PNS, dan PUI) sampai dengan Mei 2019 berjumlah 2016 orang. Sedangkan total tendik tetap sebanyak 2.417 orang. Pegawai tidak tetap (PTT), baik dosen maupun tendik PTT total berjumlah 2.460 orang.

Salah satu program yang perlu dikuatkan adalah peningkatan kualitas dosen, mengingat dosen yang berkualitas yang akan mewujudkan kualitas pendidikan. Dosen juga merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan mahasiswa. Ini berarti peningkatan kompetensi dosen sangat menentukan kualitas lulusan sebuah perguruan tinggi. UI perlu terus melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen secara berkala. Peningkatan kompetensi dosen juga bertujuan untuk mengembangkan mutu, wawasan, keterampilan dan profesionalitas dosen secara terarah dan berkelanjutan. Begitu pula dengan tenaga kependidikan sebagai aset berharga yang berperan besar dalam menentukan perkembangan UI juga mendapatkan pembinaan melalui program peningkatan kompetensi yang terstruktur untuk mendorong profesionalisme dan kualitas tenaga kependidikan sesuai jabatan yang diemban.

Aspek penting lain yang terus dilakukan dalam bidang SDM adalah internalisasi karakter unggul pada sivitas akademika UI dalam mewujudkan universitas yang unggul berbasis nilai-nilai UI. Internalisasi karakter unggul merupakan bagian dari upaya mendorong sivitas akademika berkembang dengan kompetensi berpikir dan berpegang teguh

pada prinsip-prinsip moral meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Nilai-nilai UI mencakup kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan dan/atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, serta kepatuhan pada aturan, prosedur dan panduan-panduan UI dan panduan-panduan lainnya. Nilai-nilai ini ditanamkan agar sivitas akademiknya memiliki prestasi dan tingkah laku yang baik. Internalisasi menjadi proses pembentukan kepribadian sivitas akademika UI menuju arah yang lebih baik.

Adapun dukungan sarana dan prasarana bisa tercerminkan pada program kerja sebagai berikut:

1. Membangun sarana prasarana strategis berdasarkan *need assessment*.
2. Mengelola sumber daya menggunakan prinsip *cost-sharing* dan *resource-sharing*.

UI membenahi infrastruktur untuk mendukung budaya riset dan memunculkan potensi mahasiswa berprestasi, antara lain melalui perbaikan sarana olahraga, pemutakhiran peralatan laboratorium, perbaikan *teaching class* dengan mengadaptasi teknologi terbaru, penguatan struktur *information technology* sebagai bagian dari digitalisasi kampus (*e-campus*) terintegrasi, dan pembangunan sejumlah gedung.

UI mengembangkan laboratorium berstandar internasional di gedung Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) dan alat laboratorium berkualitas tinggi. Pengembangan laboratorium ILRC diharapkan mampu mendukung sivitas UI untuk melakukan penelitian dengan maksimal sehingga mampu meningkatkan jumlah publikasi internasional dan juga membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Saat ini terdapat tiga laboratorium di gedung ILRC, yaitu Laboratorium Transmission Electron Microscopy (TEM) yang berada di lantai dasar serta Laboratorium A dan B yang berada di lantai tiga.



Pengadaan pada laboratorium ILRC selama lima tahun ini telah diadakan sebanyak tiga kali, yaitu satu peralatan Laboratorium TEM pada tahun 2015 dan beroperasi pada tahun 2016; tiga peralatan laboratorium pada tahun 2017 yang diterima pada awal tahun 2018; dan sebelas peralatan laboratorium pada tahun 2018 yang diterima pada awal tahun 2019.

### ***Manajemen GUG***

Sejak tahun 2016, UI mulai membangun fondasi kepatuhan tata kelola universitas (Good University Governance). Salah satunya mengupayakan pengelolaan keuangan UI yang memenuhi asas dan prinsip berupa tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab. Tata kelola UI memerhatikan kepatutan dan manfaat untuk semua kepentingan, termasuk masyarakat. Pada tahun 2016 juga Renstra UI disesuaikan dengan instrumen Balanced Scorecards (BSC) antara lain guna menilai kinerja Rektor.

Good university governance di UI juga menggambarkan hubungan kolegialitas dalam penerapan sistem checks and balances di antara organ-organ tertinggi UI, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), Dewan Guru Besar (DGB), dan Rektor. Rapat koordinasi eksekutif setidaknya dua bulan sekali menjadi agenda penting untuk membahas keputusan-keputusan strategis. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, MWA dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko. Key performance indicators UI merupakan keputusan kolegial yang harus menjadi komitmen bersama seluruh pimpinan di semua tingkatan, dan masing-masing pimpinan harus menurunkannya ke jajaran di bawahnya.

Penerapan good university governance di UI diperkuat dengan transformasi budaya yang mengedepankan sembilan nilai, yakni Kejujuran, Keadilan, Keterpercayaan, Kemartabatan, Tanggung Jawab, Kebersamaan, Keterbukaan, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, serta Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Nilai-nilai tersebut relevan dengan kondisi bangsa saat ini dan terus diinternalisasikan

mulai dari tingkat rektorat, fakultas, program studi, hingga sivitas akademika.

UI juga mulai membangun sistem informasi yang terintegrasi dan andal dalam mewujudkan peningkatan kinerja tata kelola universitas yang transparan dan akuntabel, mencakup pengelolaan keuangan, infrastruktur, dan komunikasi. Walau masih tahapan sangat awal dan belum sempurna, sistem informasi terintegrasi diharapkan mampu mendukung operasi dan manajemen data yang real-time.

Sistem informasi yang terintegrasi dan transparan juga akan meningkatkan akuntabilitas universitas yang kini menjadi kebutuhan penting perguruan tinggi, selain juga memberikan pelayanan prima bagi seluruh Warga UI. Integrasi pada seluruh sistem informasi diharapkan mampu memfasilitasi tata kelola UI sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengelola sistem informasi tersebut.

Pada akhir 2018, MWA UI memberlakukan kebijakan tentang Mekanisme Pengenaan Sanksi Pelanggaran Warga UI dengan mendelegasikan ke Dewan Guru Besar UI. MWA juga memberi masukan terkait pentingnya sistem pengaduan (whistle blowing) yang ditindaklanjuti Rektor dengan pembentukan Sistem Pengaduan Dugaan Pelanggaran (SIPDUGA).

Dalam penerapan tata kelola UI, beberapa hal berikut ini masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi:

1. otonomi UI belum sepenuhnya efektif karena peraturan pemerintah yang tumpang tindih mempengaruhi tata kelola yang baik;
2. integrasi antar sistem informasi tata kelola dengan basis data terintegrasi masih membutuhkan banyak perbaikan mendasar;
3. sistem dan prosedur UI belum sepenuhnya selaras dengan peraturan Kemenristekdikti;
4. dokumen rencana operasional unit dan fakultas yang

merupakan turunan Renstra UI masih berdiri sendiri dan belum menjadi satu kesatuan;

5. penerapan reward and punishment bagi unit kerja dan fakultas yang memiliki kinerja baik dan buruk belum ada;
6. corporate culture yang menjadi identitas UI belum terbentuk, budaya silo masih ada;
7. sinergi fungsi dan koordinasi antarunit kerja di lingkungan UI yang merupakan salah satu unsur penting good university governance masih menjadi kendala utama di UI;
8. quality culture yang dapat memastikan continual quality improvement UI belum terbangun.

### **Kolaborasi N-Helix**

Dalam pengembangan ilmu politik, UI memperkuat kolaborasi riset ilmu politik, dan riset lainnya, dengan pendekatan n-helix. Seperti Joint Research dan Publikasi Bersama. Selain itu, membangun aliansi dengan universitas di luar dan dalam negeri dalam pelaksanaan joint programmes, dan joint classroom.

Kolaborasi N-Helix itu dapat dikaitkan dengan pandangan bahwa perguruan tinggi merupakan center of excelent (pusat ilmu pengetahuan dan teknologi) dan merupakan bagian terpenting dalam sinergi n-helix (triple helix, quadraple helix, pentahelix, dll). Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia dan sejumlah hal yang mampu menghasilkan inovasi di berbagai bidang yang bisa membantu pemerintah dan industri dalam menjawab tantangan dan kebutuhan (Akhmad et al., 2024). Peran tri dharma perguruan tinggi juga menuntut kampus untuk senantiasa melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian dan Pengabdian masyarakat untuk Indonesia maju, tumbuh dan tangguh (<https://mediumindonesia.com/peran-perguruan-tinggi-dalam-sinergi-nhelix-untuk-indonesia-unggul-dan-inovatif/>).

Munculnya konsep n-helix didasarkan pada tuntutan jaman dan

industri yang terus berkembang yang diawali dengan konsep triple helix yang muncul karena adanya kebutuhan interaksi antara kampus, pemerintah dan industri yang semakin erat. Konsep Triple helix pertama kali diperkenalkan oleh Henry Etkowits dan Loet laydessdorf (1995). Konsep ini lalu dikembangkan oleh Gibbons at al dalam the New Production of Knowledge dan Nowonty at al dalam Rethinking Sciences. Etkowits (2008) menyatakan dalam karya ilmiahnya The Triple Helix Model of Innovation and Motivation: University is not only critical to the commercial transformation of knowledge, but also to create space for knowledge, assembling and innovation. Konsep triple helix banyak dipakai di negara maju dalam perkembangan science dan teknologi melalui kerjasama univeritas dan pemerintah dan industri untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Untuk konteks Indonesia, synergy antara Perguruan tinggi dengan pemerintah, industri/bisnis dan masyarakat telah banyak dilakukan. Sinergi antara kampus dan pemerintah dilakukan dengan memberi solusi terhadap apa yang menjadi masalah pemerintah dan industri setidaknya memikirkan dan memecahkan secara bersama sama baik melalui kajian, riset, dll. Salah satu contoh konkrit peran perguruan tinggi dalam synergy nhelix adalah saat sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Dekan Teknik Indonesia (FDTI) secara bersama sama dengan pemerintah melakukan kajian dan aksi nyata untuk menangani Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Dalam kaitannya dengan synergy n-helix, Prof Nizam Dirjen Dikti menyatakan bahwa Perguruan tinggi sebagai mata air bagi pemerintah, industri, dunia usaha, masyarakat dan media, dan harus mampu mendisrupsi diri dan menyiapkan mahasiswa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang responsif dan adaftif terhadap perubahan zaman. Caranya adalah dengan melakukan link and match antara perguruan tinggi dengan dunia kerja melalui sinergi dalam penyusunan kurikulum pembelajaran.

Peran Perguruan tinggi dalam sinergy n-helix adalah sebagai motor penggerak dalam mewujudkan inovasi dan pengembangan industri. Perguruan tinggi merupakan agent of change. Untuk itu kampus dengan segala keunggulannya haruslah bersinergy dengan industri, pemerintah, masyarakat dan media untuk menghasilkan inovasi baru demi mewujudkan Indonesia yang inovatif, tumbuh, tangguh dan Bermartabat.

### **Transformasi Budaya Nilai-Nilai UI**

Penerapan budaya nilai-nilai UI, yaitu kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan dilakukan dengan strategi transformasi. Yaitu melalui tridharma yang mencakup pendidikan atau pembelajaran di kelas dan luar kelas, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dikembangkan juga melalui kolaborasi atau kerjasama dengan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pendekatan n-helix.

Strategi tersebut dipilih dalam rangka mengantisipasi kebutuhan dunia industri sehubungan dengan revolusi industri 4.0, UI terus membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di antaranya, memutakhirkan mata ajar yang memiliki high-impact, memperkuat elemen soft skills dalam proses pembelajaran, dan merevisi kurikulum agar sesuai dengan revolusi industri.

Peta strategi UI 2020-2024 menggunakan pendekatan Balanced Scorecards yang terdiri atas empat perspektif, yaitu Pemangku Kepentingan (Stakeholder), Proses Bisnis Internal (Internal Business Process), Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning & Growth), dan Keuangan (Financial). Ke-empat perspektif menjadi dasar untuk memastikan bahwa semua program dan upaya yang dilakukan UI selaras dengan visi, misi, dan tujuan UI.

Tujuan UI dalam perspektif pemangku kepentingan adalah menuju UI yang inovatif, mandiri, inklusif, bermartabat, serta unggul di Asia

Tenggara dan dunia. Pemangku kepentingan mencakup mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, industri dan bisnis, serta masyarakat lainnya. Untuk mencapai tujuan pemangku kepentingan, UI melakukan proses bisnis internal yang terdiri atas pencapaian pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi; pengelolaan pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat yang berbasis riset; dan penerapan tata kelola yang efektif. Proses bisnis internal yang efektif perlu ditunjang oleh target dan kegiatan yang selaras dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan untuk membangun semua elemen penting di dalam UI yang mencakup aktivitas pencapaian pusat talenta yang terbaik; informasi yang relevan, tepat waktu, dan berkualitas; pengembangan sarana dan prasarana yang strategis; serta budaya kinerja yang unggul. Semua aspek-aspek dalam ketiga perseptif di atas akan berjalan baik bila ditunjang oleh dukungan keuangan yang kuat.

## **SIMPULAN**

Artikel ini menyimpulkan bahwa inovasi pengembangan ilmu politik di Universitas Indonesia menjadi bagian dari konsep utama pengembangan keilmuan dan kelembagaan dengan karakteristik inovasi kebijakan. Yaitu, *pertama*, jenis dukungan berupa adanya Pusat Talenta, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan penguatan sarana dan prasarana.

*Kedua*, penguatan manajemen atau tata kelola berbasis *Good University Governance* (GUG). Dengan indikator terimplementasinya sistem pengendalian internal berbasis COSO (Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP). Dan, terimplementasinya peraturan organisasi yang mengatur hubungan kerja antar organ.

*Ketiga*, kolaborasi dengan pendekatan N-Helix. Kolaborasi N-Helix ini melihta bahwa UI sebagai *center of excelent* (pusat ilmu pengetahuan dan teknologi) dan merupakan bagian terpenting dalam sinergi n-helix (triple helix, quadraple helix, pentahelix, dll).

Dan *keempat*, penciptaan dan penerapan nilai, yang dikenal dengan 9

budaya nilai UI, melalui strategi transformasi. Seperti *strategic performance culture* (budaya kerja yang unggul). Hal itu dilaksanakan dengan program memastikan transformasi budaya nilai-nilai UI. Selain itu, program melaksanakan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan.

Temuan-temuan penelitian ini dapat berkontribusi bagi kajian pengembangan ilmu politik di Indonesia. Terutama terkait pola-pola pengembangan ilmu politik melalui inovasi kebijakan yang digunakan oleh unit pengelola program studi ataupun oleh program studi pada perguruan tinggi.

Artikel ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau lokus penelitian yang lebih luas. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan agenda penelitian lebih lanjut dengan memperluas lokus penelitian, termasuk lokus penelitian pada perguruan tinggi-perguruan tinggi yang dikategorikan perintis pengembangan ilmu politik di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Nasional, dan Universitas 17 Agustus. Selain itu, dapat juga diperluas pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang ikut melaksanakan pengembangan ilmu politik.

### **Daftar Pustaka**

- Akhmad, A., Badruddin, S., Januaripin, M., Salwa, S., & Gaspersz, V. (2024). *Inovasi Dalam Manajemen Pendidikan Tinggi: Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfian. (1986). *Ilmu Politik di Indonesia*. Gadjah Mada Press.
- Budiardjo, M., & Rauf, M. (1983). *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches*. SAGE Publications.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar ilmu politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action*. Routledge.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). *The Triple Helix: University–Industry–*

*Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development.* Continuum.

- Gatara, A. A. S. (2009). Ilmu politik memahami dan menerapkan. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Gatara, A. A. S., Supriatna, E., & Jamaludin, A. N. (2018). Model Pengembangan Ilmu Politik di PTKIN: Pengalaman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Jurnal Review Politik*, 8(2).
- Handayani, T. (2015). Relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan kebutuhan tenaga kerja di era global. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 53–64.
- M.B. Miles, Huberman, M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publication, Inc.
- Navarro, F. M. (2016). From government innovation to public innovation. The ICT as Key Tools. *International Journal of New Technology and Research*, 2(6), 263496.
- Salsabila, F., Cahyo, R. D., Nadhira, S., & Amelia, D. (2024). Dampak Inovasi dan Daya Saing Perusahaan terhadap Budaya Organisasi. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 469–479.
- Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 14–31.
- Zahra, H., & Wahyu, F. P. (2025). Evaluation of Public Service Performance of Disdukcapil through a Balanced Scorecard Approach. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 17(1), 248–260.